



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **VENNETIA RYCKERENS DANES**
2. Jabatan : **DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**
3. NHK : **546806**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/340 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 27787 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , WARISAN Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 129 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 350.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L DAKAR WARNA HITAM Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 360.706.227**F. HARTA LAINNYA** Rp. 3.509.025.105

Sub Total Rp. 8.219.731.332

III. HUTANG Rp. 225.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 7.994.731.332

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.